

JALAN SEHAT BUMN DI PALEMBANG

Direktur Keuangan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Saifullah Lasindrang (kiri) menerima obor dari milenial BUMN saat Jalan Sehat Bersama BUMN di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/3). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar jalan sehat bersama dalam memperingati 25 tahun Kementerian BUMN.



Pemerintah Alokasikan Anggaran Ketahanan Pangan Rp104,2 Triliun

Sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51% (yoy).

JAKARTA (IM) - Pemerintah tetap waspada dan antisipatif serta terus memperkuat ketahanan domestik dalam mencermati kondisi perekonomian global saat ini. Pertumbuhan ekonomi global sendiri diproyeksikan oleh IMF akan melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023.

Melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mampu memberikan kepastian. Lebih lanjut, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Terkait dengan ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian Pemerintah

terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi. Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3), seperti dilansir dari laman Kemenko Perekonomian.

Sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51% (yoy).

J Trust Bank Setujui Rights Issue untuk Perkuat Modal

JAKARTA (IM) - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) telah menyetujui penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebagai upaya memperkuat struktur modal perseroan. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) di Jakarta, akhir pekan kemarin, para pemegang saham menyetujui pengangkatan Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama, efektif sejak diterimanya keputusan persetujuan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilansir dari Antara, dengan adanya tambahan modal dari J Trust Co, Ltd untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun itu, perseroan merealisasikan tambahan modal tersebut menjadi tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pelaksanaan PMHMETD lewat Penawaran Umum Terbatas III 2023 (PUT III 2023).

Adapun, jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD melalui PUT III 2023 sebanyak-banyaknya 10 miliar saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 per saham, yang ditawarkan dengan harga yang akan ditetapkan

"Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik dan memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan," kata Airlangga.

Penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan kemudahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro.

Airlangga juga meng-

ingatkan bahwa dalam memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Oleh karena itu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.

"Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan," ungkap Airlangga.

Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024.

"Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga. Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi *over-buying* akibat misinformasi," tegas Airlangga. • dro

PLN Nusantara Power Pasok 19.902 MWh Energi Bersih

JAKARTA (IM) - PT PLN Nusantara Power meningkatkan produksi energi bersih di sektor pembangkitan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerapan co-firing untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelolanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus melakukan inovasi dalam melakukan transisi energi. Ini dilakukan demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

"Dengan berbagai *extraordinary effort* di antaranya melalui biomass co-firing, kami berhasil menekan emisi gas rumah kaca. Selain itu, inovasi ini

juga meningkatkan bauran EBT di lingkungan pembangkit PLN," kata Darmawan, Minggu (5/3).

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN Nusantara Power Rully Firmansyah menjelaskan memasuki triwulan pertama di tahun 2023, PLN Nusantara Power telah menyumbangkan 19.902 Megawatt hour (MWH) energi bersih dari co-firing. Sebagian besar energi bersih tersebut disumbangkan oleh PLTU Paiton 1-2 dan PLTU Paiton 9 dengan total daya mencapai 8.852,64 MWh.

"Selain pengembangan unit pembangkit berbasis EBT, perlu strategi yang tepat untuk mendorong produksi energi bersih pada PLTU yang ada. Dengan pencapaian ini, kami harap dapat meningkatkan persentase bauran co-firing di lingkungan pembangkitan PLN," kata Rully.

Sebelumnya, pada tahun 2022, PLN Nusantara Power telah melampaui target produksi energi bersih dari co-firing hingga 178,32 persen. PLN Nusantara Power mampu memproduksi energi bersih sebesar 250,39 Gigawatt hour (GWh) dari target 140,42 GWh.

"Ini dapat dicapai berkat inovasi yang dilakukan perusahaan dan sinergi antar instansi yang baik. Pemanfaatan biomassa ini sekaligus menjadikan pembangkit PLN episentrum pendayagunaan ekonomi kerakyatan," jelas Rully. • dot



TARGET UMKM MASUK EKOSISTEM DIGITAL

Pengunjung mengamati produk UMKM dalam pesta wirausaha di Taman GOR Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (5/3). Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak 24 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital hingga akhir 2023 dan tercatat hingga Desember 2022 sebanyak 20,76 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

BNI Ikutkan UMKM dengan Produk Berkualitas di Inacraft 2023

JAKARTA (IM) - Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diikutsertakan dalam pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft 2023 memiliki produk berkualitas dan terbukti mampu menembus standar kualitas dunia.

"Masing-masing pelaku UMKM Binaan BNI memiliki latar belakang yang sangat menarik dan mampu menjadi percontohan bagi pelaku UMKM untuk tetap bersemangat dalam berkarya guna melompat lebih tinggi di dalam negeri maupun di pasar mancanegara," kata Adi Sulistyowati yang akrab dipanggil Susi di Jakarta, Sabtu (4/3).

Inacraft 2023 yang mewadahi para perajin seluruh Indonesia diselenggarakan di Jakarta, 1-5 Maret 2023.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), lanjutnya, BNI berkomitmen kuat mendukung program pemerintah dalam pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM dengan tujuan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dukungan yang diberikan BNI kepada UMKM sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang juga menaungkan Gerakan Nasional "Bangga Buatan Indonesia" atau BBI sebagai wujud dukungan untuk UMKM Indonesia.

"BNI turut menuangkan dukungan kepada UMKM melalui program bertajuk BNI Xpora dengan terlibat dalam Inacraft 2023 yang memiliki tema 'From Smart Village to Global Market'," ucap Adi.

Dia mengharapkan segmen UMKM yang sudah bertumbuh sangat baik pada 2022 dapat terus berkembang.

BNI akan terus mendorong pelaksanaan pameran nasional, terutama dalam skala global, untuk mendukung para pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan mengeksport produk ke mancanegara. "Kami sangat bangga dapat berkontribusi pada Jakarta Inacraft 2023. Kami percaya, ajang ini dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di awal tahun ini," ujar Adi. • hen

BI: GNPIP Tekan Inflasi Pangan 2022 Jadi 5,61%

JAKARTA (IM) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2022 yang dimulai pada Juli berhasil menurunkan inflasi pangan dari 11,47 persen secara tahunan pada Agustus menjadi 5,61 persen di akhir 2022.

"Di semua daerah, inflasi pangan pada 2022 juga tampak mengalami penurunan drastis," kata Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dipantau di Jakarta, Minggu (5/3).

Dilansir dari Antara, pada 2022 melalui GNPIP, Bank Indonesia berhasil menggelar 2.638 pasar murah di 46 kantor perwakilan, 63 kerja sama antar daerah, 75 program subsidi ongkos angkut, dan menyalurkan 2,4 juta polybag untuk gerakan tanam cabai di 46 kantor perwakilan di daerah.

Bank Indonesia juga tercatat berhasil menggelar 86 program replikasi model bisnis, menyalurkan alat dan mesin pertanian senilai Rp32,21 miliar di 45 kantor perwakilan, dan menjalankan 48 program digitalisasi data dan informasi.

Pada 2023, BI akan mengoptimalkan operasi pasar murah, memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai program, meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang telah disalurkan, memperkuat kerja sama antar daerah, memfasilitasi distribusi pangan, memperkuat infrastruktur teknologi informasi komunikasi, dan memperkuat

koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

"Kita sudah menyipakan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, peta jalan pengendalian inflasi pangan dari berbagai daerah. Itu sudah ada," ucapnya.

BI menargetkan dapat menyelenggarakan pasar murah di 4.683 titik, menyalurkan 2,63 juta bit dalam program pangan mandiri, mereplikasi *best practice* program pangan di 100 klaster, menjalankan 74 program hilirisasi pangan, 113 program pupuk organik, dan menyalurkan alat dan mesin pertanian senilai Rp36,15 miliar.

Selain itu, BI juga menargetkan dapat melaksanakan 108 program kerja sama daerah tangani inflasi pangan, 190 program distribusi pangan, 58 program digitalisasi data, 115 program capacity building untuk tim pengendali inflasi daerah, 122 kegiatan diversifikasi pangan, dan 461 kegiatan untuk penguatan koordinasi kelembagaan.

Perry juga mengatakan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,1 persen secara tahunan di 2023 dengan inflasi yang terkendali. "Inflasi di paruh kedua bisa sampai di bawah 4 persen. Di semester I inflasi masih di atas 5 persen sehingga kita harus kerja keras untuk menurunkan inflasi, terutama inflasi pangan," kata Perry.

Pengendalian inflasi dengan menjaga ketahanan pangan akan dapat mendorong konsumsi masyarakat yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). • pan